CAKUPAN SELURUH PROVINSI DI INDONESIA

KKN-PPM UGM Jadi Delapan SKS

YOGYA (KR) - Mahasiswa UGM kini bisa mendapat rekognisi satuan kredit semester (SKS) sebanyak 8 SKS dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) yang merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan.

Menurut Sekretaris Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM Dr Ir Ambar Kusumandari MES, UGM menjadi salah satu pelopor kegiatan KKN dengan cakupan lokasi hingga mencapai seluruh provinsi di Indonesia. Kebijakan penambahan jumlah SKS untuk kegiatan KKN-PPM dari tiga SKS menjadi delapan SKS menunjukkan komitmen UGM dalam menyelenggarakan KKN-PPM sebagai salah satu kegiatan pembelajaran yang tidak tergantikan.

KR-Humas UGM

Para narasumber menyampaikan paparan di acara Pojok Bulaksumur.

"Di beberapa perguruan tinggi mata kuliah KKN menjadi opsi, namun di UGM itu adalah mata kuliah wajib yang juga menjadi salah satu penciri UGM sehingga tidak dapat digantikan dengan mata kuliah lain. Bahkan saat ini KKN menjadi delapan SKS," ucapnya pada acara Pojok Bulaksumur yang digelar Rabu (19/10) di halaman Gedung Pusat UGM.

Kepala Subdirektorat Kuliah Kerja Nyata, Nanung Agus Fitriyanto SPt MSc PhD memaparkan, dengan mengikuti kegiatan KKN-PPM mahasiswa bisa memperoleh nilai dari komponen mata kuliah KKN-PPM sebesar empat SKS, mata kuliah Komunikasi Masyarakat sebesar dua SKS, serta dua SKS lainnya dari mata kuliah Penerapan Teknologi Tepat Guna ataupun mata kuliah Manajemen Ilmu Pengetahuan.

"Ini sudah berlaku mulai KKN-PPM periode II. Saat ini KKN yang tengah berlangsung adalah KKN Periode III," kata Nanung.

KKN-PPM sendiri merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepribadian serta menghasilkan mahasiswa yang mampu menganalisis permasalahan dan potensi dalam masyarakat, mempunyai empati dan kepedulian terhadap segala bentuk permasalahan dalam masyarakat, dan mampu menerapkan IPTEKS melalui kerja sama lintas disiplin.

Penyelenggaraan KKN di UGM, menurut Nanung, bersifat dinamis untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan tuntutan zaman. Hal ini terlihat dari tema program KKN yang bisa dikembangkan sendiri oleh para mahasiswa bersama dosen pembimbing lapangan sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah penempatan. **(Dev)-f**

RSUP

Sambungan hal 1

dengan atau tanpa gejala demam. Selain itu munculnya gejala diare dan batuk pilek perlu pula diwaspadai," sambungnya.

Selain itu, para orangtua juga diimbau untuk tidak memberikan konsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran tenaga kesehatan kompeten. "Kami imbau pada orangtua yang memiliki anak terutama yang berusia balita agar sementara tidak mengonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah," pungkasnya.

Terpisah, Sekda DIY Drs K Baskara Aji mengemukakan saat ini Pemda DIY bekerja sama dengan Rumah Sakit Akademisi UGM untuk mencari tahu penyebab dari kasus gagal ginjal akut (kronis) pada anak-anak. Seperti di ketahui, sejak Januari hingga Oktober 2022 ini, terdapat 13 anak di DIY yang menderita gagal ginjal akut tanpa diketahui penyebabnya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs K Baskara Aji di Yogyakarta, Rabu (19/10).

Baskara Aji mengatakan, saat ini perguruan tinggi, rumah sakit dan laboratorium kesehatan diajak mencari penyebabnya.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana meminta masyarakat tidak panik. Meskipun tetap harus waspada. "Kita tunggu bagaimana kesimpulan dari penelitian yang dilakukan para ahli. BPOM, ikatan dokter anak dan Kemenkes maupun Dinkes," ungkapnya. **(Fxh/Ria/Awh)-d**

Diduga

Sambungan hal 1

Terlebih, saat jaksa membacakan isi pesan HS yang secara tersirat meminta hadiah di HUT-nya yang ke-55. "Ada juga uang yang diterima seluruhnya berjumlah Rp 275 juta terdiri Rp 170 juta diterima HS serta uang sebesar Rp 105 juta dari Nurwidihartana," jelas Jaksa.

Kemudian hadiah berupa barang diterima HS berupa satu unit Mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna hitam tahun 2010 Nopol B-680-EGR dan satu unit sepeda elektrik merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE warna Carbon Blue dari PT Java Orient Property (JOP) melalui Dandan Jaya Kartika dan Oon Nasihono (keduanya sudah dituntut JPU 2-3 tahun penjara) serta dari PT Guyub Sengini Grup melalui Sentanu Wahyudi.

"Diketahui atau patut diduga hadiah-hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya," terang Jaksa.

Berbagai hadiah yang diberikan kepada para terdakwa itu ditujukan untuk memuluskan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP, penerbitan IMB Hotel *Iki Wae* atau Aston Malioboro yang diajukan PT Guyub Sengini Group. "Saat itu prosedur dan persyaratan administrasi untuk diterbitkannya kedua IMB tersebut belum berhasil terpenuhi," urai Jaksa.

Dalam dakwaan pertama JPU menilai perbuatan ketiga terdakwa merupakan tindak pidana korupsi. Dengan jeratan pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sedangkan dakwaan kedua JPU menjerat HS dkk dengan pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. **(Vin)-f**

Hak

Sambungan hal 1

Hingga saat ini terdapat 206 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal yang terjadi pada anak-anak di Indonesia. Kementerian menyatakan bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan pemberian vaksin Covid-19. Mengingat program vaksin belum menyasar anak-anak di usia balita. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium hingga saat ini, sementara ditemukan jejak senyawa yang berpotensi menyebabkan gangguan ginjal akut progresif atipikal.

Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, pemerintah meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat dalam bentuk cair atau sirup sampai dengan adanya hasil pemeriksaan yang tuntas. Sebelum Kementerian Kesehatan melakukan konferensi pers ini, BPOM telah memberikan penjelasan terkait isu obat sirup yang mengandung cemaran *Etilen Glikol* (EG) dan *Dietilen Glikol* (DEG) yang telah menyebabkan gagal ginjal akut pada anak di Gambia tidak beredar di Indonesia. Dalam penjelasannya BPOM menyatakan bahwa produk obat sirup yang beredar di Gambia tersebut diproduksi perusahaan farmasi di India.

Hak atas Kesehatan adalah hak asasi manusia dan hal ini juga tertera dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak atas Kesehatan ini juga dilindungi oleh Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Hal ini juga senada dengan Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan ini telah dikenal sejak deklarasi hak konsumen yang disampaikan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy tahun 1962.

Guna mewujudkan hak atas kesehatan dan keamanan produk obat-obatan ini, perlu adanya dukungan dari seluruh elemen yaitu pemerintah, pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Oleh karena itu, demi kehati-hatian dalam rangka antisipasi selagi menunggu hasil penelitian lebih lanjut dari pemerintah, seyogyanya pelaku usaha tidak memperdagangkan untuk sementara obat-obatan dalam bentuk cair ataupun sirup sesuai anjuran kementerian Kesehatan.

Hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi ancaman sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat juga harus mendukung upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak-anak. Dengan memperhatikan ketentuan yang telah disampaikan pemerintah terkait dengan pengobatan pada anak. Kewaspadaan dan kehati-hatian dari berbagai pihak terkait merupakan wujud iktikad baik yang perlu dilakukan. Guna penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak ini. (*Penulis adalah Dosen Tetap FH UII)-d*

DJARUM BEASISWA BULUTANGKIS

Terapkan Sistem Penilaian Ketat

KUDUS (KR) - Rangkaian Audisi Umum PB Djarum 2022 dilaksanakan di GOR Djarum Jati, Kudus, Rabu-Minggu (19-23/10). Proses seleksi untuk dua kelompok usia yakni U-11 dan U-13 putra dan putri ini hingga Rabu pukul 12.00 WIB diikuti tak kurang 2.334 pebulutangkis belia dari berbagai daerah.

Selama lima hari penyelenggaraan audisi umum, ribuan atlet belia tersebut akan memperebutkan Djarum Beasiswa Bulutangkis dari Bakti Olahraga Djarum Foundation dan kelak bergabung menjadi atlet binaan PB Djarum.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation yang juga Ketua PB Djarum Yoppy Rosimin mengatakan, penyelenggaraan Audisi Umum PB Djarum bertema #TeruskanSemangatJuara ini merupakan pijakan awal dalam proses pembinaan oleh PB Djarum. Untuk itu, Yoppy menekankan bahwa proses seleksi berlangsung ketat demi menemukan bibit-bibit berkualitas yang kelak ditempa di Asrama PB Djarum.

KR-Istimewa

Peserta audisi berjuang pada ajang Djarum Beasiswa Bulutangkis.

"Inilah yang menjadi alasan mengapa seleksi melalui audisi umum menjadi penting untuk terus diselenggarakan. Karena, melahirkan para juara itu merupakan proses dari sebuah investasi jangka panjang yang harus dimulai sejak para atlet berusia usia dini," ungkap Yoppy.

Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Djarum Sigit Budiarto membenarkan audisi umum tahun ini menerapkan sistem penilaian yang ketat demi mendapatkan bibit pebulutangkis berkarakter dan berkualitas sesuai kriteria yang ditentukan PB Djarum. "Kami berharap dengan berbagai elemen yang diterapkan dari jajaran Tim Pencari Bakat pada Audisi Umum PB Djarum 2022 ini, kami bisa mendapatkan atlet berkarakter yang memiliki bakat dan skill mumpuni serta semangat juang dan mental sebagai calon juara," papar Sigit.

Audisi Umum PB Djarum 2022 diikuti peserta dari Jawa Tengah 1.155 peserta, Jawa Barat 323 peserta, Jawa Timur 282 peserta, Bali 18 peserta, Sumatera 84 peserta, Kalimantan 71 peserta, Sulawesi 71 peserta dan Papua 20 peserta. **(Sal/Trq)-f**

Polisi

Sambungan hal 1

Menurut Kasat Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jufri, keduanya menimbun BBM dengan menggunakan dua mobil yang tankinya sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan membeli di SPBU Jalan Yogya-Imogiri Timur (Bukan Imogiri Barat, seperti tertulis di *KR* 1 Rabu 19/10).

Sementara petugas Polsek Srandakan Polres Bantul membubarkan kelompok pemuda yang sedang pesta minuman keras (miras) di Jembatan Srandakan, Selasa (18/10) malam. Polsek Srandakan, malam itu melakukan patroli. Ketika melalui jalan dekat Jembatan Srandakan, petugas melihat kerumunan pemuda yang mencurigakan. "Ketika didatangi petugas kerumunan pemuda tersebut berhamburan meninggalkan lokasi," jelas Kapolsek Srandakan Kompol Sudarsono SH.

Di lokasi tersebut petugas menemukan sejumlah botol yang di dalamnya masih tersisa jenis miras, sehingga dipastikan kerumunan pemuda tersebut sedang melakukan pesta miras. Hal tersebut dikuatkan, adanya sejumlah botol bekas miras berserakan di lokasi. **(Jdm)-d**

Kanjeng

Sambungan hal 1

pendampingan, dan bimtek bidang perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan kalurahan, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta internalisasi Budaya Pemerintahan Satriya.

Peran dukuh selaku pelaksana kewilayahan strategis dalam reformasi bikrokrasi kalurahan tersebut, salah satunya mengawasi realisasi kinerja pembangunan di wilayahnya. "Sehingga ke depannya Pemerintah Kalurahan harus siap diberikan target penurunan kemiskinan dan angka stunting, baik pada tingkat padukuhan maupun kalurahan, yang diusung bersama dengan Pemkab dan Pemda DIY," tegas Kanjeng Yudanegara.

Sekda Sleman Harda Kiswaya menyambut baik reformasi bikrokrasi kalurahan, yang dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Ketua Nayantaka Gandang Hardjanata menyatakan kesiapan Pemerintah Kalurahan di DIY untuk melaksanakan reformasi birokrasi. "Nayantaka mengusulkan kepada Pemda DIY untuk membentuk dinas yang khusus menangani kalurahan, supaya pelaksanaan reformasi kalurahan lebih efektif," ujar Gandang.

Sedangkan Ketua Paguyuban Dukuh DIY 'Semar Sembogo' Sukiman menyampaikan, jumlah dukuh yang hadir sekitar 450 orang. "Saya mengapresiasi Pemda DIY yang bisa hadir dan berdiskusi dengan dukuh se-DIY. Harapan saya, agar Danais lebih merata masuk ke kalurahan dan padukuhan," kata Sukiman. **(*)-d**

Ganjar

Sambungan hal 1

Pembuatan embung tetap jalan terus sampai hari ini. Makanya kalau ada ruang-ruang sisa kita manfaatkan," tuturnya.

Kepala Dinas Pusdataru Jateng Eko Yunianto mengatakan, pihaknya telah membangun embung 74 unit di 19 kabupaten/kota. Embung tersebut ditambah dengan 17 longstorage milik Pusdataru berkapasitas tampungan air 2,5 juta meter kubik. Pemanfaatannya untuk irigasi 2.015 hektare lahan pertanian dan sumber air baku untuk 27.912 kepala keluarga (KK).

Selain embung, di Jateng juga terdapat 41 bendungan eksisting. Eko menambahkan, saat ini tengah dibangun tiga bendungan baru, yakni Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang, Bendungan Jlantah di Karanganyar, dan Bendungan Bener di Purworejo. Ada juga empat bendungan yang sertifikasi operasionalnya masih berproses yaitu Bandungan Logung di Kabupaten Kudus, Bendungan Gondang di Karanganyar, Bendungan Pidekso di Wonogiri, dan Bendungan Randugunting di Blora.

"Bendungan tidak hanya dimanfaatkan airnya untuk irigasi dan sumber air baku untuk warga, melainkan juga untuk menyuplai kebutuhan industri dan pariwisata," tutur Eko Yunianto. **(Bdi)-f**

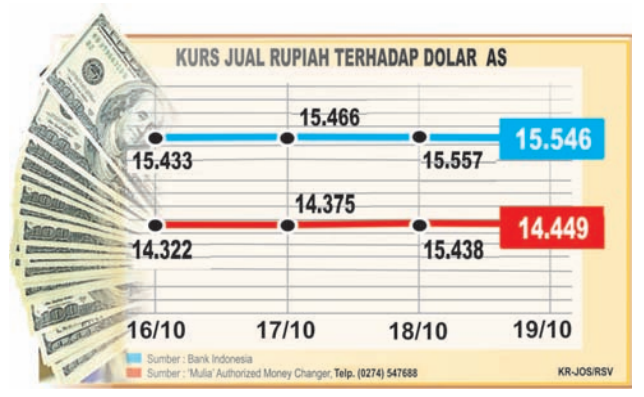

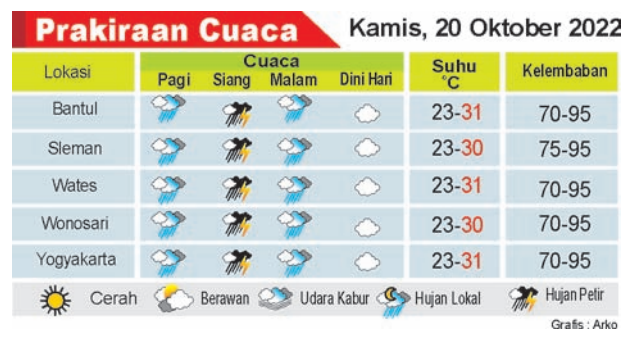

Bahasa Politik dalam Perspektif Filsafat

Dr Junaidi, SAg MHum MKom
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

BERBICARA masalah filsafat dapat dikisahkan seseorang yang berpijak di bumi dalam keadaan sedang tengadah di bintang bintang. Dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan galaksi atau seseorang yang sedang berdiri di puncak yang tinggi, llau memandang ke ngarai dan lembah di bawahnya. Artinya, seorang filusuf ingin menyimak kehadiranya dengan kesemestaan yang melingkupinya. Perumpamaan ini mengindikasikan bahwa berfikir filsafat adalah bersifat menyeluruh. Hakikatnya adalahsebuah ada rasa ingin tahu untuk melihat dalam kontestasi pengetahuan yang lainnya.

Secara historisitas abad 20 filsafat mengalami peristiwa pembalikan. Peristiwa dalam dunia filsafat yang mengalami pembalikan ke arah bahasa (linguistic turn). Filsafat bahasa merupakan cabang filsafat yang muncul paling akhir di abad 20. Bahasa merupakan masalah yang fundamental bagi manusia. Pada awalnya manusia berkomunikasi dengan simbol-simbol yang merupakan bentuk bahasa yang sangat sederhana kemudian berkembang menjadi bahasa yang sangat kompleks. Artinya, bisa dikatakan bahwa bahasa sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri.

Di samping bahasa masih ada problematika yang merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia yaitu masalah politik. Argumen pemikiran Aristoteles manusia adalah Animal Sociale atau Zoon Politicon. Manusia adalah bianatang yang tidak dapat hidup sendiri. Ia selalu hidup bersama dan membutuhkan orang lain. Ia bukan hanya sekedar hidup berkelompok atau hidup ada bersama-sama dengan yang lain. Ia membutuhkan hidup bersama orang lain yang di dalamnya terdapat saling berhubungan dan saling ketergantungan. Secara kodrati hidup bersama dengan orang lain adalah suatu kebutuhan. Dalam hidup bersama ini secara alamiah muncul suatu sistem yang sistemik yang mengatur kepentingan hidup bersama.

Permasalahan politik menyangkut kekuasaan, pengaturan kepentingan bersama merupakan problematika yang sangat rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan masalah politik selalu berkaitan dengan berbagai kepentingan dari berbagai kekuatan dan dimensi. Kompleksitas masalah ini juga disebabkan tingkat relativitas dan labilitas kebenaran (politis) yang sangat tinggi. Kebenaran politis sifatnya sangat subjektif dan relatif. Perbedaan antara kebenaran dengan ketidakbenaran sangat tipis. Sesuatu yang dianggap salah secara politis dengan mudah akan menjadi benar dalam perspektif pihak lain yang kemudian berkuasa. Muatan kepentingan lebih dominan dalam penentuan kebenaran atau kesalahan.

Secara ilmiah dan narasi logika, kebenaran politis lebih relatif dari pada kebenaran hukum, kebenaran ilmiah, dan kebenaran lainnya yang mempunyai tolok ukur yang jelas. Politik bisa disejajarkan dengan seni, tidak ada sesuatu tidak bisa dikatakan pasti A atau pasti B. Politik lebih jauh juga merupakan seni yang melibatkan gaya dan bakat. Politik tidak hanya semata-mata adu kekuatan, tetapi bagaimana seni mengolah kekuatan sendiri maupun pihak lain terhadap strateginya. Artinya, politik sekaligus juga merupakan permainan. Permainan dalam politik ini merupakan representasi manusia sebagai homo luden atau hewan yang suka bermain.

Eksistensi "senjata" yang dibutuhkan dalam dunia politik adalah diplomasi dan persepsi. Diplomasi dibutuhkan dalam hubungan horisontal sedangkan pembentukan persepsi dalam kaitannya dengan hubungan vertikal. Baik diplomasi maupun pembentukan persepsi membutuhkan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini tidak hanya komunikasi verbal, tetapi juga komunikasi non verbal. Peranan bahasa sangat penting dalam politik sebagai media komunikasi. Bahasa yang tepat dibutuhkan dalam rangka diplomasi maupun pembentukan persepsi. Diplomasi dan pembentukan persepsi merupaka sarana untuk melanggengkan jalan mencapai tujuan.

Bahasa mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara pribadi maupun dalam hidup bersama. Kemampuan berbahasa sangat penting dalam pergaulan. Bahasa merupakan sarana untuk menyelesaikan konflik, namun bahasa juga bisa menimbulkan konflik (Panggabean, xvii). Dalam masalah ini pengunaan bahasa dalam berpolitik membutuhkan seni tersendiri agar dapat bermain lincah. Politik itu sendiri merupakan suatu permainan dalam pertarungan. Dalam pertarungan ini aktor harus pandai memerankan peranannya. Bermain dengan menggunakan bahasa yang tepat untuk mencapai tujuan yaitu kemenangan.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

Menarik asumsi Hikam, bahasa tidak lagi dipahami sebagai medium netral yang berada di luar pembicara. Apabila dikaitkan dengan wacana politik bukan alat atau medium netral, melainkan merupakan representasi dirinya dalam hubungan-hubungan politis tetapi merupakan ruang bagi pertarungan kuasa-kuasa tertentu. Pandangan ini menentang pandangan sebelumnya yang berasumsi bahwa bahasa itu netral sebagaimana pendangan kelompok lingkaran Wina seperti penganut Positivisme Logis dan Atomisme logis sebagaimana pandangan Wittgenstein tahap pertama. Bahasa lewat struktur logis mampu menggambarkan realitas dan makna tidak lain daripada penggambaran suatu keadaan faktual dalam realitas melalui bahasa. Semoga! ***